**PENANAMAN MODAL DAERAH – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG**

**ABSTRAK :** - Bahwa sehubungan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan adanya beberapa perubahan di dalam tata cara penanaman modal, maka perlu adanya penyesuaian dalam rangka mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi dalam penanaman modal daerah, bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan, sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 11 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 12 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
3. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
4. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
5. Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha
6. Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
7. Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal
8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
10. Sanksi Administratif
11. Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**CATATAN :** -